

**Analisis tingkat kesehatan lembaga unit pengelola kegiatan(studi kasus
pada UPK PNPM Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)**

Oleh :

Wawan Apriyanto

F.1306618

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan campur tangan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelestarian. Melalui

proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1999. Sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan disertakan program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen / sektor dan pemerintah daerah.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan juga dapat diwujudkan dengan tidak terjadinya tumpang tindih antar program maupun proyek pemerintah.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana / sarana lingkungan pemukiman, sosial, dan kegiatan ekonomi, meliputi : penyediaan sumber daya keuangan melalui dana

bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Dalam PTO Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan tahun 2005, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga di tingkat Kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) – PNPM Mandiri yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan meliputi kegiatan prasarana / sarana, pendidikan, kesehatan, UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan). Kegiatan UEP dan SPP dikelola dan disalurkan sebagai dana bergulir di tingkat Kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dalam penyaluran dana bergulir tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu melainkan kepada kelompok yakni Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Simpan Pinjam. Prinsip transparansi, partisipasi, keberpihakan pada orang miskin, akuntabilitas, pelestarian dan pengembangan merupakan dasar-dasar pengelolaan dana bergulir.

Sejalan dengan tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, maka dunia usahapun termotivasi untuk semakin berkembang dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha di perdesaan. Sehingga mereka mendapat peluang kerja, meningkatkan usaha, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga meningkat pula kesejahteraan daerahnya, baik yang bergerak dibidang jasa maupun industri terutama

industri rumah tangga dan industri kecil. Untuk menumbuhkan kegiatan usaha tersebut, melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan, pemerintah telah menggulirkan kredit pada Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri khususnya di kecamatan Kalijambe kabupaten Sragen.

Dalam PTO Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan tahun 2005 menjelaskan bahwa penilaian aspek keuangan ditekankan pada pendekatan rasio-rasio keuangan yang mengarah kepada operasional UPK yang sehat. Penilaian ini dilakukan untuk menghasilkan kualitas pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian aspek keuangan meliputi : manajemen antara lain : perencanaan, administrasi, pelaporan ; rasio keuangan antara lain : rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, rasio likuiditas, efektivitas pengelolaan dana.

Analisis tingkat kesehatan UPK merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemerintah, pengelola (manajemen), masyarakat, dan pihak lainnya. Analisis tingkat kesehatan UPK adalah analisis terhadap hasil usaha UPK dalam kurun waktu tertentu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja UPK dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Hasil analisis tingkat kesehatan UPK memberikan gambaran penilaian kinerja UPK. Kinerja yang sehat menunjukkan bahwa UPK sebagai tangan panjang pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin yang mandiri, berhasil membawa misi program.

Dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) III 2005 dan Petunjuk Pelaksanaan Audit Keuangan UPK PPK 2006 mengatur tentang penilaian kinerja UPK khususnya tingkat kesehatan UPK dalam pengelolaan dana

kegiatan SPP maupun UEP yang dapat dinilai dari beberapa indikator. Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan UPK yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan UPK. Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai analisis kesehatan UPK dengan menggunakan laporan keuangan UPK PNPM Mandiri kecamatan Kalijambe kabupaten Sragen untuk tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **"ANALISIS TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (STUDI KASUS PADA UPK PNPM KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN)"**.

B. Perumusan Masalah

UPK sebagai suatu lembaga keuangan non profit di tingkat Kecamatan yang mengelola dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang berprinsip pada transparansi, keberpihakan terhadap orang miskin, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat maka diperlukan penilaian terhadap tingkat kesehatan lembaga UPK. Dengan adanya tujuan penilaian terhadap klasifikasi tingkat kesehatan UPK tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana tingkat kesehatan Lembaga UPK PNPM Mandiri kecamatan Kalijambe selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bila ditinjau dari Indikator Klasifikasi Tingkat Kesehatan UPK.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Lembaga UPK PNPM Mandiri kecamatan Kalijambe selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bila ditinjau dari Indikator Klasifikasi Tingkat Kesehatan UPK.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga

Berguna sebagai masukan kepada pihak manajemen sehubungan dengan kebijakan yang telah diambil pada periode sebelumnya untuk menentukan kebijakan operasional di masa mendatang serta sebagai informasi dalam kegiatan operasional lembaga UPK PNPM Mandiri kecamatan Kalijambe.

b. Bagi Pemerintah Daerah kecamatan Kalijambe

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir di Lembaga UPK PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kalijambe.

c. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai sumber data atau informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sejenis di masa yang akan datang.